Katalog: 1103003.7325

### **DATA STRATEGIS**KABUPATEN LUWU TIMUR

2020





Katalog: 1103003.7325

### DATA STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

2020





### **DATA STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR** 2020

Junitimurkab bps.90.id No. Publikasi : 73250.2024 No. Katalog : 1103003.7325 Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm Jumlah Halaman : x + 55 halaman

### Naskah:

BPS Kabupaten Luwu Timur

### Penyunting:

BPS Kabupaten Luwu Timur

### Desain Kover oleh:

BPS Kabupaten Luwu Timur

### Penerbit:

BPS Kabupaten Luwu Timur

### Pencetak:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur.

### DATA STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR 2020

### **TIM PENYUSUN**

Penanggung Jawab : Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur

Koordinator Teknis : Seksi IPDS

Penyusun : Galuh Permata Sari, S.Tr.Stat.

Penyunting : Siti Maisyarokh, SST

https://www.inurkab.bps.go.id



Dalam rangka meningkatkan pelayanan statistik, BPS berupaya menyajikan data agar lebih mudah dipahami oleh pengguna data. Buku ini dirancang bagi para birokrat, pelaku usaha, akademisi, pelajar, mahasiswa dan masyarakat luas yang memerlukan data dan informasi ringkas dan strategis.

Data yang disajikan dalam buku ini mencakup data penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, kemiskinan, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk kemudahan pemahaman dan pemanfaatan data disertakan penjelasan teknis.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Meskipun berbagai upaya terbaik telah kami lakukan, namun kekurangan dan kesalahan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu saran dan kritik demi perbaikan publikasi ini sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malili, Desember 2020 BPS Kabupaten Luwu Timur Kepala,

Muhlis SE,M.Si.

https://www.inurkab.bps.go.id

### **DAFTAR ISI**

	Ha	laman
Ka	ta Pengantar	V
Da	ftar Isi	vi
Da	ftar Tabel	viii
1	Kependudukan	1
	Ketenagakerjaan	
3	PDRB	23
4	IPM	37
	Kemiskinan	
6	Pendidikan	49

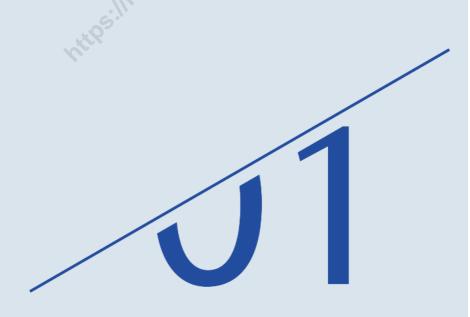
### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur (jiwa), 2015-20196
Tabel 2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan d Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019
Tabel 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019
Tabel 4 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 2015-2019
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Luwu Timur 2015-2019
Tabel 6 Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 2015-2019
Tabel 7 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019 19
Tabel 8 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019
Tabel 9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurur Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019 20
Tabel 10 Tinggal Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin d Kabupaten Luwu Timur, 2018-201921
Tabel 11 Tinggal Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2018-201921
Tabel 12 Tinggal Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin d Kabupaten Luwu Timur, 2018-201922
Tabel 13 Tinggal Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2018-201922
Tabel 14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstar 2010 Kabupaten Luwu Timur (juta rupiah), 2015-2019

abel 15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur (Persen), 2015- 201928
abel 16 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-201929
abel 17 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-201930
abel 18 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-201931
abel 19 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-201932
abel 20 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017- 201933
abel 21 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-201933
abel 22 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Persen), 2017-201934
abel 23 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Persen), 2017-201934
abel 24 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur (Juta Rupiah/Jiwa/Tahun), 2015-201935
abel 25 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (persen), 2015-201935
abel 26 Indeks Pembangunan Manusia, 2017-201941
abel 27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, 2015- 201941
abel 28 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Luwu Timur, 2015-201941
abel 30 Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, 2015-201947

Tabel	31	Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur, 2015-201947
Tabel	32	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 5-18 Tahun Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-201954
Tabel	33	Angka Partisipasi Murni (APM) Umur 7-18 Tahun Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-201954
Tabel	34	Angka Partisipasi Kasar (APK) Umur 7-18 Tahun Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-201954
Tabel	35	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019
Tabel	36	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-2019
		*

# KEPENDUDUKAN



https://www.inurkab.bps.go.id

### **KEPENDUDUKAN**

### 1.1. Konsep dan Definisi

**Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

**Kepadatan penduduk (***Population Density***)** adalah jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daerah tersebut, biasanya dinyatakan sebagai penduduk per km².

Laju pertumbuhan penduduk (LPP/Growth Rate of Population) adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan dihitung menggunakan metode geometric (Geometric Rate of Growth) yakni:

$$r = ((P_n/P_0)^{(1/n)}) - 1$$
;

dimana: P<sub>0</sub> = Jumlah penduduk pada tahun awal,

 $P_n$  = Jumlah penduduk pada tahun ke-n,

r = Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun awal ke tahun ke-n,

n = Banyaknya perubahan tahun.

Rasio Jenis Kelamin (SR/Sex Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan persen. Rumus perhitungannya yakni:

$$SR = \frac{P_L}{P_W} x \ 100$$

dimana: SR = Rasio Jenis Kelamin,

P<sub>1</sub> = Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki,

Pw = Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

Rasio Ketergantungan (*Dependentcy Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke

(keduanya disebut dengan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (Angkatan kerja). Rumus perhitungannya yakni :

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$$

dimana: RK = Rasio Ketergantungan,

 $P_{(0-14)}$  = Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun),

 $P_{65+}$  = Jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas),

 $P_{(15-64)}$  = Jumlah penduduk usia produktif (15-54 tahun).

### 1.2. Manfaat

- a. Kepadatan penduduk untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah, digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk,
- b. Laju pertumbuhan penduduk untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu,
- **c. Rasio jenis kelamin** untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil,
- **d. Rasio Ketergantungan** untuk mengetahui perkembangan besarnya beban perekonomian yang ditanggung oleh usia produktif di suatu wilayah.

### 1.3. Interpretasi

- a. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap kilometre persegi. Semakin besar kepadatan penduduk menunjukkan semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut,
- b. Laju pertumbuhan penduduk(LPP):
  - LPP>0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
  - LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
  - LPP<0 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### c. Rasio jenis kelamin(SR/Sex Ratio) :

- SR>100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Misal, rasio jenis kelamin 102 berarti di wilayah tersebut setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.
- SR=100 berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

- SR<100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
- d. Semakin tinggi Rasio ketergantungan, semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Misal, rasio ketergantungan 49 berarti setiap 49 orang penduduk tidak produktif akan ditanggung oleh 100 orang penduduk produktif.

### 1.4. Sumber Data

Sumber data kependudukan adalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur (jiwa), 2015-2019

Vocemeter	Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa)						
Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Burau	18 206	18 709	19 195	19 675	20 146		
Wotu	15 338	15 537	15 722	15 896	16 057		
Tomoni	13 330	13 707	14 071	14 432	14 791		
Tomoni Timur	6 317	6 367	6 407	6 442	6 471		
Angkona	12 150	12 324	12 479	12 626	12 764		
Malili	18 794	19 139	19 449	19 751	20 042		
Towuti	15 382	15 552	15 695	15 827	15 948		
Nuha	12 751	13 215	13 673	14 136	14 602		
Wasuponda	12 302	12 928	13 564	14 221	14 895		
Mangkutana	11 456	11 718	11 966	12 209	12 447		
Kalaena	5 661	5 716	5 763	5 805	5 843		
LUWU TIMUR	141 687	144 912	147 984	151 020	154 006		

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035

### Lanjutan Tabel 1.

Vasamatan	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)						
Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Burau	17 695	18 177	18 653	19 122	19 598		
Wotu	15 182	15 396	15 586	15 765	15 932		
Tomoni	12 738	13 095	13 452	13 805	14 153		
Tomoni Timur	6 083	6 130	6 172	6 208	6 240		
Angkona	11 486	11 648	11 803	11 948	12 084		
Malili	17 520	17 824	18 134	18 428	18 699		
Towuti	13 785	13 930	14 072	14 198	14 311		
Nuha	11 638	12 059	12 486	12 914	13 345		
Wasuponda	11 092	11 655	12 238	12 834	13 450		
Mangkutana	11 101	11 353	11 601	11 843	12 078		
Kalaena	5 588	5 643	5 693	5 738	5 777		
LUWU TIMUR	133 908	136 910	139 890	142 802	145 667		

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035

### Lanjutan Tabel 1.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-laki + Perempuan (Jiwa)						
Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Burau	35 901	36 886	37 848	38 797	39 744		
Wotu	30 520	30 933	31 308	31 661	31 989		
Tomoni	26 068	26 802	27 523	28 237	28 944		
Tomoni Timur	12 400	12 497	12 579	12 650	12 711		
Angkona	23 636	23 972	24 282	24 574	24 848		
Malili	36 314	36 963	37 583	38 179	38 741		
Towuti	29 167	29 482	29 767	30 025	30 259		
Nuha	24 389	25 274	26 159	27 050	27 947		
Wasuponda	23 394	24 583	25 802	27 055	28 345		
Mangkutana	22 557	23 071	23 567	24 052	24 525		
Kalaena	11 249	11 359	11 456	11 543	11 620		
LUWU TIMUR	275 595	281 822	287 874	293 822	299 673		

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035

Tabel 2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Kasamatan	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk				
Kecamatan	(km2)		2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Burau	256,23	140,11	143,96	147,71	151,41	155,11	
Wotu	130,52	233,83	237,00	239,87	242,57	245,09	
Tomoni	230,09	113,30	116,49	119,62	122,72	125,79	
Tomoni Timur	43,91	282,39	284,60	286,47	288,10	289,48	
Angkona	147,24	160,53	162,81	164,92	166,90	168,76	
Malili	921,20	39,42	40,13	40,80	41,44	42,05	
Towuti	1 820,48	16,02	16,19	16,35	16,49	16,62	
Nuha	808,27	30,17	31,27	32,36	33,47	34,58	
Wasuponda	1 244,00	18,81	19,76	20,74	21,75	22,79	
Mangkutana	1 300,96	17,34	17,73	18,12	18,49	18,85	
Kalaena	41,98	267,97	270,59	272,89	274,96	276,80	
Luwu Timur	6 944,88	39,68	40,58	41,45	42,31	43,15	

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035 dan Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2020

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Kecamatan	2010-2019	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Burau	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Wotu	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tomoni	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tomoni Timur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Angkona	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Malili	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Towuti	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Nuha	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Wasuponda	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mangkutana	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Kalaena	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Luwu Timur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035

Tabel 4 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Burau	102,89	102,93	102,91	102,89	102,80
Wotu	101,03	100,92	100,87	100,83	100,78
Tomoni	104,65	104,67	104,60	104,55	104,51
Tomoni Timur	103,85	103,87	103,81	103,77	103,70
Angkona	105,78	105,80	105,72	105,67	105,63
Malili	107,27	107,37	107,25	107,18	107,18
Towuti	111,59	111,64	111,54	111,47	111,44
Nuha	109,56	109,58	109,51	109,46	109,42
Wasuponda	110,91	110,92	110,84	110,81	110,74
Mangkutana	103,20	103,22	103,15	103,09	103,06
Kalaena	101,30	101,29	101,23	101,17	101,14
Luwu Timur	105,81	105,84	105,79	105,75	105,72

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	32 540	32 822	33 087	33 337	32 540
5-9	29 810	30 341	30 858	31 359	29 810
10-14	27 520	27 873	28 264	28 672	27 520
15-19	24 614	24 778	24 850	24 900	24 614
20-24	22 316	22 985	23 616	24 146	22 316
25-29	25 307	25 910	26 520	27 158	25 307
30-34	24 588	24 917	25 286	25 722	24 588
35-39	20 891	21 144	21 384	21 615	20 891
40-44	17 803	18 149	18 454	18 723	17 803
45-49	14 838	15 379	15 874	16 306	14 838
50-54	12 607	13 224	13 855	14 475	12 607
55-59	10 546	11 077	11 617	12 181	10 546
60-64	6 817	7 175	7 557	7 945	6 817
65-69	4 873	5 059	5 261	5 489	4 873
70-75	3 337	3 478	3 625	3 780	3 337
75+	3 415	3 563	3 714	3 865	3 415
Luwu Timur	281 822	287 874	293 822	299 673	281 822

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035

Tabel 6 Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Kecamatan	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)
2015	56,80
2016	56,28
2017	55,83
2018	55,45
2019	55,13

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Timur 2010-2035

https://www.inurkab.bps.go.id

## KETENAGA-KERJAAN



https://www.inurkab.bps.go.id

### KETENAGAKERJAAN

### 2.1. Konsep dan Definisi

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization* (ILO). Dalam konsep ketenagakerjaan, populasi terbagi menjadi dua yaitu:

- Penduduk usia kerja/usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.
- Penduduk bukan usia kerja/usia nonproduktif adalah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun.

**Angkatan Kerja (Labor Force)** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan. Terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran.

**Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tanpa terputus) dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja yang tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah banyaknya Angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas. Rumus perhitungannya yaitu,

$$TPAK = \frac{a}{h} \times 100\%$$

dimana: a = Jumlah angkatan kerja

b = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Rumus perhitungannya yaitu,

$$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$$

dimana: a = Jumlah pengangguran

b = Jumlah angkatan kerja

### 2.2. Manfaat

 a. Indikator Angkatan Kerja bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

- **b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.
- **c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mengindikasikan besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

### 2.3. Interpretasi

- a. Semakin tinggi jumlah Angkatan Kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
- **b.** Semakin tinggi **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak anggkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

### 2.4. Sumber Data

Sumber data ketenagakerjaan adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Tabel 7 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019

Kegiatan Utama	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angkatan Kerja	138 367	144 010	137 236
- Bekerja	134 795	140 865	131 634
- Pengangguran Terbuka	3 572	3 145	5 602
		10	
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK(%)	70,03	71,21	66,52
3. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT(%)	2,58	2,18	4,08

Sumber : BRS Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur

Tabel 8 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019

Lapangan Pekerjaan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	68 754	68 652	57 817
%	51,01	48,74	43,92
Nonpertanian	66 041	72 213	73 817
%	48,99	51,26	56,08
Total	134 795	140 865	131 634

Sumber: Sakernas Agustus 2017-2019

Tabel 9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019

Status Pekerjaan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	21 776	16 178	25 306
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	28 624	35 700	24 431
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	6 239	3 864	4 537
Buruh/Karyawan/Pegawai	39 002	38 001	51 185
Pekerja Bebas di Pertanian	7 488	9 253	6 147
Pekerja Bebas di Nonpertanian	4 452	5 216	2 098
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	27 214	32 653	17 930
Total	134 795	140 865	131 634

Sumber : Sakernas Agustus 2017-2019

Tabel 10 Tinggal Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	88,22	53,07	71,21
2019	85,57	46,2	66,52

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018-2019 (Publikasi Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019)

Tabel 11 Tinggal Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	66,52	72,83	71,21
2019	66,56	66,51	66,52

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018-2019 (Publikasi Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019)

Tabel 12 Tinggal Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	1,75	2,95	2,18
2019	4,51	3,24	4,08

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018-2019 (Publikasi Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019)

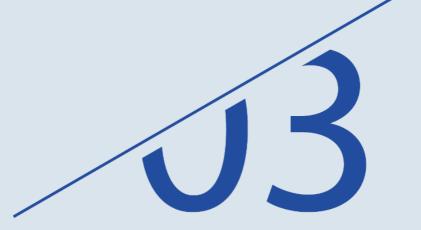
Tabel 13 Tinggal Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	4,92	1,32	2,18
2019	6,66	3,15	4,08

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018-2019 (Publikasi Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019)

# PDRB INTURBERS

https://



https://www.inurkab.bps.go.id

### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

### 3.1. Konsep dan Definisi

**Produk Domestik Bruto(PDB)** atau **Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)** merupakan penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun.

Pendekatan Penyusunan PDR/PDRB dalam publikasi ini meliputi:

### 1. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total nilai produksi (*output*) tiap-tiap sector atau subsektor.

### 2. Pendekatan Penggunaan (Pengeluaran/Expenditure Approach)

PDB/PDRB diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Perhitungan dengan pendekatan ini menggunakan rumus:

$$PDB = C + I + G + (E - Im)$$

dimana: PDB = Produk Domestik Bruto,

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga,

I = Investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok),

G = Pengeluaran konsumsi pemerintah,

E-Im = Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

**Harga Berlaku** adalah nilai tambah barang dab jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

**Harga Konstan** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

### 3.2. Indikator Penting Turunan dari Data PDRB

**PDRB per kapita** adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*Economy growth*) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Rumus perhitungannya yaitu:

$$Laju \ pertumbuhan \ PDRB = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

dimana: PDRB<sub>t</sub> = PDRB tahun tertentu, PDRB<sub>t-1</sub> = PDRB tahun sebelumnya.

**Distribusi persentase PDRB (***Distribution of GDRP***)** merupakan sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan (lapangan usaha dalam PDRB sectoral atau penggunaan dalam PDRB pengeluaran) terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Rumus perhitungannya yaitu:

$$Distribusi\ PDRB = \frac{PDRB}{\sum PDRB} \times 100\%$$

dimana: PDRB = Produk Domestik Regional Bruto.

Indeks harga implisit merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Rumus perhitungannya yaitu:

$$P_t = \frac{I_t}{Y_t} \times 100$$

dimana: Pt = Indeks harga implisit periode t,

It = PDRB atas dasar harga berlaku periode t,

Y<sub>t</sub> = PDRB atas dasar harga konstan periode t.

#### 3.3. Manfaat

- a. PDRB per kapita untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.
- b. Laju pertumbuhan PDRB digunakan untuk: a) mengukur pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional; b) sebagai dasar pembuaran proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sectoral dan regional; c) sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.
- c. Distribusi persentase PDRB menunjukkan peranan/sumbangan setiap sector ekonomi terhadap PDRB pada periode tertentu.
- **d. Indeks harga implisit** mencerminkan kenaikan harga pada periode tertentu terhadap periode tahun dasar.

#### 3.4. Interpretasi

a. Semakin besar PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

- b. Laju pertumbuhan PDRB atau Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.
- c. Distribusi PDRB, misal: besarnya sumber pertumbuhan PDRB dari sector perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2018 sebesar 1,2 persen berarti sector perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 1,2 persen terhadap nilai PDRB pada tahun 2018.
- d. Indeks harga implisit yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan periode tahun dasar.

#### 3.5. Sumber Data

Sumber data PDRB adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Tahunan Industri Besar dan Sedang(IBS) dan data yang dikumpulkan dari .ara indikah dinas/instansi terkait.

#### 3.6. Makna Simbol

- : Angka Sementara
- : Angka Sangat Sementara

Tabel 14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Luwu Timur (juta rupiah), 2015-2019

Tahun	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)
2015	19 216 561,81	14 631 058,73
2016	17 395 068,40	14 862 310,82
2017	18 341 283,10	15 318 716,53
2018*	20 393 893,90	15 837 801,10
2019**	20 996 749,60	16 022 945,20

Tabel 15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur (Persen), 2015-2019

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
(1)	(2)
2015	6,42
2016	1,58
2017	3,07
2018*	3,44
2019**	1,17

Tabel 16 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2019

	Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
	(1)	(2)	(3)	(4)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 488 747,34	4 941 165,30	5 005 805,80
В	Pertambangan dan Penggalian	8 795 474,30	9 741 532,80	9 504 925,50
С	Industri Pengolahan	635 626,14	691 960,30	801 193,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 966,78	9 721,23	10 171,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 229,97	1 357,89	1 471,10
F	Konstruksi	1 644 089,49	1 885 660,92	2 192 080,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	681 935,37	775 841,05	882 665,10
Н	Transportasi dan Pergudangan	132 112,48	146 264,58	164 428,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36 473,02	41 407,97	46 132,70
J	Informasi dan Komunikasi	255 449,40	288 236,83	46 132,70
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	165 738,32	189 925,04	210 775,70
L	Real Estat	432 680,30	465 327,84	509 270,10
M,N	Jasa Perusahaan	9 445,29	10 755,23	12 096,30
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	439 631,30	517 747,43	566 441,90
Р	Jasa Pendidikan	368 418,84	409 500,42	454 545,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222 666,61	251 514,23	280 438,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	22 598,12	25 987,83	28 836,10
	Produk Domestik Regional Bruto	18 341 283,10	20 393 893,90	20 996 749,60

Tabel 17 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2019

	Lapangan Usaha		2018*	2019**
	(1)	(2)	(3)	(4)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 955 133,64	3 150 529,40	3 183 973,30
В	Pertambangan dan Penggalian	8 667 996,48	8 681 490,72	8 447 706,10
С	Industri Pengolahan	430 907,19	455 673,60	521 872,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9 091,63	9 630,73	10 029,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 051,62	1 139,35	1 206,40
F	Konstruksi	1 188 708,17	1 279 365,34	1 403 975,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	549 462,57	606 129,55	669 824,20
Н	Transportasi dan Pergudangan	91 413,93	100 787,37	111 864,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22 901,95	25 594,80	27 785,30
J	Informasi dan Komunikasi	241 297,25	266 313,35	294 885,70
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	126 056,52	134 022,49	141 691,70
L	Real Estat	261 709,35	274 471,91	295 870,90
M,N	Jasa Perusahaan	6 401,57	7 073,53	7 817,00
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	294 124,68	330 230,51	348 463,10
Р	Jasa Pendidikan	272 675,99	296 293,13	317 685,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	184 290,96	201 792,85	219 429,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	15 493,04	17 262,44	18 864,40
	Produk Domestik Regional Bruto	15 318 716,53	15 837 801,10	16 022 945,20

Tabel 18 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2019

	Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
	(1)	(2)	(3)	(4)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,47	24,23	23,84
В	Pertambangan dan Penggalian	47,95	47,77	45,27
С	Industri Pengolahan	3,47	3,39	3,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,96	9,25	10,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,72	3,80	4,20
Н	Transportasi dan Pergudangan	0,72	0,72	0,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,20	0,22
J	Informasi dan Komunikasi	1,39	1,41	1,55
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90	0,93	1,00
L	Real Estat	2,36	2,28	2,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,06
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	2,54	2,70
P	Jasa Pendidikan	2,01	2,01	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,23	1,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,12	0,13	0,14
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Tabel 19 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2019

	Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
	(1)	(2)	(3)	(4)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,12	6,61	1,06
В	Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,16	-2,69
С	Industri Pengolahan	4,26	5,75	14,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,30	5,93	4,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,07	8,34	5,88
F	Konstruksi	6,17	7,63	9,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,53	10,31	10,51
Н	Transportasi dan Pergudangan	6,39	10,25	10,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,54	11,76	8,56
J	Informasi dan Komunikasi	9,85	10,37	10,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,67	6,32	5,72
L	Real Estat	6,61	4,88	7,80
M,N	Jasa Perusahaan	6,55	10,50	10,51
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,70	12,28	5,52
Р	Jasa Pendidikan	5,30	8,66	7,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,60	9,50	8,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,53	11,42	9,28
	Produk Domestik Regional Bruto	3,07	3,39	1,17

Tabel 20 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2019

Jenis Pengeluaran	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7 203 745,88	8 132 634,74	8 894 647,35
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	182 111,38	205 293,69	260 009,47
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	936 804,88	1 026 151,31	1 125 944,11
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 981 599,92	5 466 167,13	5 987 966,19
Perubahan Inventori	- 229 951,12	- 152 322,81	- 75 703,26
Net Ekspor	5 266 972,15	5 715 969,87	4 803 885,74
Produk Domestik Regional Bruto	18 341 283,09	20 927 200,16	20 996 749,61

Tabel 21 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2019

Jenis Pengeluaran	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 101 735,21	5 335 410,96	5 689 645,46
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	123 996,08	131 684,89	162 369,96
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	590 525,72	598 866,86	638 900,89
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 695 782,25	3 899 786,91	4 103 990,57
Perubahan Inventori	- 153 519,61	- 78 801,08	-38 482,15
Net Ekspor	5 960 196,89	5 950 852,55	5 466 520,46
Produk Domestik Regional Bruto	15 318 716,53	15 837 801,09	16 022 945,19

Tabel 22 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2019

Jenis Pengeluaran	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	39,28	38,86	42,36
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,99	0,98	1,24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,11	4,90	5,36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,16	26,12	28,52
Perubahan Inventori	-1,25	-0,73	-0,36
Net Ekspor	28,72	27,31	22,88
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Tabel 23 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Luwu Timur menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2019

Jenis Pengeluaran	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,58	6,64
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,34	6,20	23,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,08	1,41	6,68
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,23	5,52	5,24
Perubahan Inventori	-23,79	-48,67	-51,17
Net Ekspor	-38,36	-0,16	-8,14
Produk Domestik Regional Bruto	3,07	3,39	1,17

Tabel 24 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur (Juta Rupiah/Jiwa/Tahun), 2015-2019

Tahun	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)
2015	69,73	53,09
2016	61,72	52,74
2017	63,71	53,21
2018*	69,41	53,90
2019**	70,07	53,47

Tabel 25 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (persen), 2015-2019

Tahun	ADHK
(1)	(2)
2015	4,03
2016	-0,66
2017	0,90
2018*	1,30
2019**	-0,81

https://www.inurkab.bps.go.id

# IPM inure abit to be seen to be s

https:/



https://www.inurkab.bps.go.id

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

# 4.1. Konsep dan Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM/Human Development Indeks) didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat Pendidikan dan standar hidup layak.

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun uang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis Pendidikan yang pernah dijalani. Perhitungan lama sekolah untuk mereka yang tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan tamat SMA adalah 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

**Pengeluaran per Kapita (PPP)** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

#### 4.2. Manfaat

- a. Angka Harapan Hidup(AHH) saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- b. Harapan Lama Sekolah(HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system Pendidikan di berbagai jenjang.
- c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat digunakan untuk : 1) melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang Pendidikan; 2) perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.
- d. Data Pengeluaran dapat mengungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran rumah tangga dapat

dipakai sebagai salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk, dimana makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

### 4.3. Interpretasi

- a. Angka Hartapan Hidup(AHH) Indonesia pada tahun 2016 sebesar 70,90 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 70,90 tahun.
- b. Harapan Lama Sekolah(HLS) Indonesia pada 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.
- c. Rata-rata Lama Sekolah(RLS) menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang Pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indicator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.
- **d.** Pengeluaran per kapita(PPP) Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp 10.150.000, artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia selama setahun adalah Rp 10.150.000.

# 4.4. Sumber Data

Sumber data indeks pembangunan manusia adalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Tabel 26 Indeks Pembangunan Manusia, 2017-2019

No	IPM	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Luwu Timur	71,46	72,16	72,80
2	Provinsi Sulawesi Selatan	70,34	70,9	71,66
3	Nasional	70,81	71,39	71,92

Tabel 27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM(%)
(1)	(2)	(3)
2015	70,43	0,98
2016	70,95	0,73
2017	71,46	0,72
2018	72,16	0,98
2019	72,80	0,89

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Tabel 28 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	PPP (Ribu Rp/orang/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	69,64	12,36	7,87	11 925,89
2016	69,71	12,78	7,88	11 960,00
2017	69,79	12,79	8,20	12 030,00
2018	70,03	12,81	8,45	12 346,00
2019	70,38	12,82	8,54	12 802,00

Indeks Komponen IPM Kabupaten Luwu Timur (tahun), 2015-2019 Tabel 29

Tahun	Indeks Kesehatan	Indeks HLS	Indeks RLS	Indeks RLS Indeks Pendidikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	76,36	68,69	52,49	60,59	75,52
2016	76,48	71,00	52,53	61,77	75,61
2017	76,60	71,06	54,67	62,86	75,78
2018	76,97	71,17	56,33	63,75	76,58
2019				09	
		Luwu Timur	imurkat		

# KEMISKINAN

NHPS.

https://www.inurkab.bps.go.id

# **KEMISKINAN**

# 5.1. Konsep dan Definisi

**Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/P0)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

**Indek Keparahan Kemiskinan (***Poverty Severity Index*/**P2)** adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Koefisien Gini/Gini Ratio** didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

#### 5.2. Manfaat

- a. Persentase Penduduk Miskin (P0) dapat digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin.
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.
- c. Indek Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.
- d. Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

# 5.3. Interpretasi

- **a. Persentase Penduduk Miskin (P0)** menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskinyang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.
- b. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
- c. Semakin tinggi nilai Indek Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- **d. Koefisien Gini** berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

#### 5.4. Sumber Data

Sumber data kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) .

Tabel 30 Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (p0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (p2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	19,67	7,18	1,28	0,35	254 957
2016	21,08	7,52	1,09	0,23	277 520
2017	21,94	7,66	1,6	0,5	289 214
2018	21,15	7,23	1,16	0,28	315 478
2019	20,83	6,98	1,11	0,25	333 739

Tabel 31 Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019

Tahun	Gini Ratio
(1)	(2)
2015	0,467
2016	0,434
2017	0,411
2018	0,398
2019	

https://www.inurkab.bps.go.id

# PENDIDIKAN

https://www.inurkab.bps.go.id

# **PENDIDIKAN**

# 6.1. Konsep dan Definisi

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2017, Pendidikan Non Formal (Paket A,Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Rumus perhitungannya yaitu:

$$APS 7 - 12 \ tahun = \frac{yang \ masih \ bersekolah}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 7 - 12 \ tahun} \times 100\%$$

$$APS 13 - 15 \ tahun = \frac{yang \ masih \ bersekolah}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 13 - 15 \ tahun} \times 100\%$$

$$APS 13 - 15 \ tahun = \frac{yang \ masih \ bersekolah}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 13 - 15 \ tahun} \times 100\%$$

$$APS 16 - 18 \ tahun = \frac{yang \ masih \ bersekolah}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 16 - 18 \ tahun} \times 100\%$$

$$APS 19 - 24 \ tahun = \frac{yang \ masih \ bersekolah}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 19 - 24 \ tahun} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2017, Pendidikan Non Formal (Paket A,Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Rumus perhitungannya yaitu:

$$\textit{APM SD} = \frac{\textit{Jumlah murid SD/sederajat usia 7} - 12 \textit{tahun}}{\textit{Jumlah penduduk usia 7} - 12 \textit{tahun}} \times 100\%$$

$$\textit{APM SMP} = \frac{\textit{Jumlah murid SMP/sederajat usia } 13-15 \textit{ tahun}}{\textit{Jumlah penduduk usia } 13-15 \textit{ tahun}} \times 100\%$$

$$APM \, SMA = \frac{Jumlah \, murid \, SMA/sederajat \, usia \, 16 - 18 \, tahun}{Jumlah \, penduduk \, usia \, 16 - 18 \, tahun} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Rumus perhitungannya yaitu:

$$APK SD = \frac{Jumlah \ murid \ SD/sederajat}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 7-12 \ tahun} \times 100\%$$
 
$$APK \ SMP = \frac{Jumlah \ murid \ SMP/sederajat}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 13-15 \ tahun} \times 100\%$$
 
$$APK \ SMA = \frac{Jumlah \ murid \ SMA/sederajat}{Jumlah \ penduduk \ usia \ 16-18 \ tahun} \times 100\%$$

#### 6.2. Manfaat

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan.
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan; untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu; sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

#### 6.3. Interpretasi

a. Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Contohnya: APS 7-

- 12 tahun sebesar 95,44 persen, artinya sekitar 95,44 persen penduduk berusia 7-12 tahun di wilayah tersebut sedang bersekolah.
- b. Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Contoh: APM SMP sebesar 64,17 persen, artinya sekitar 65 persen penduduk berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/Sederajat.
- c. Nilai Angka Partisipasi Kasar(APK) bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Contoh: APK SMA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 sebesar 61,32 persen, artinya persentase penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Luwu Timur yang bersekolah di tingkat SMA sekitar 61 persen.

### 6.4. Sumber Data

Sumber data pendidikan adalah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Tabel 32 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 5-18 Tahun Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-2019

Tahun	5-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	23,13	99,47	97,68	72,28
2018	11,47	99,77	97,49	70,3
2019	20,20	99,66	98,43	69,32

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019, BPS Kabupaten Luwu Timur

Tabel 33 Angka Partisipasi Murni (APM) Umur 7-18 Tahun Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-2019

Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	98,91	80,82	64,47
2018	99,77	78,02	60,16
2019	99,03	78,20	61,11

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019, BPS Kabupaten Luwu Timur

Tabel 34 Angka Partisipasi Kasar (APK) Umur 7-18 Tahun Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-2019

Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	109,75	91,64	91,11
2018	107,92	88,5	82,03
2019	108,98	84,71	85,93

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019, BPS Kabupaten Luwu Timur

Tabel 35 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB
Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	19,02	18,72	19,13
SD/MI	26,73	23,82	20,67
SMP/MTs	20,32	19,71	21,40
SMA/MA	21,87	25,97	23,25
SMK/MAK	2,63	2,02	3,98
D1 dan D2	0,92	0,8	0,18
Akademi/D3	1,9	1,91	2,72
D4/S1/S2/S3	6,6	7,05	8,66
Jumlah	100	100	100

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019, BPS Kabupaten Luwu Timur

Tabel 36 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Luwu Timur (persen), 2017-2019

Tahun	Huruf	Latin	atin Huruf Arab		Segala Jenis Huruf	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	93,42	6,58	23,82	76,18	93,72	6,28
2018	94,42	5,58	20,12	79,88	94,8	5,2
2019	95,68	4,32	16,85	83,15	95,72	4,28

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019, BPS Kabupaten Luwu Timur





